



BPKAD Persulit Pencairan Dana Covid-19?

NANGA PINOH, SP - Penanganan warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 terkendala masalah anggaran. Hal ini dipicu terkait anggaran Dinkes yang disebut belum cair dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Melawi.

Salah satunya terkait dengan penyediaan konsumsi bagi warga yang menjalani isolasi di Posko Kenual. Sebuah pesan yang tersebar di grup WhatsApp menyebut adanya permintaan bantuan makanan dari organisasi luar karena Dinkes disebut tak lagi menyediakan makanan bagi warga yang diisolasi di posko tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Melawi, Ahmad Jawahir saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Ia mengungkapkan anggaran untuk makan minum dan perawatan pasien yang diisolasi hingga kini belum cair, sehingga menyulitkan Dinkes untuk menangani pasien positif Covid-19 yang harus diisolasi khusus.

"Ada kesan BPKAD mempersulit. Padahal sudah diputuskan oleh bu PJ (Pjs Bupati, Linda Purnama) dan pak Sekda di forum rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk pembayaran Covid harus

segera ditunaikan," jelasnya.

Ahmad Jawahir mengungkapkan, sejak enam bulan ini, pihaknya terpaksa harus menalangi belanja untuk keperluan isolasi pasien. Ia hanya dijanjikan bahwa anggaran tersebut akan dicairkan kedepan.

"Sudah ditalangi enam bulan karena janji ke janji mau dibayar. Ternyata sampai hampir akhir tahun tak juga dibayar," keluhnya.

Pihaknya pun kini terpaksa harus kembali menalangi kebutuhan pasien Covid-19 yang dirawat atau diisolasi di Posko Kenual. Padahal seluruh administrasi untuk pencairan dana tersebut telah diajukan ke BPKAD.

"Hampir semua anggaran untuk Covid ini belum cair. Sekarang juga kami undang rapat lagi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Melawi, Abang Mangkota yang dikonfirmasi melalui WhatsApp belum menjawab permintaan wawancara dari Suara Pemred.

Jadi Prioritas Belanja

Sekda Melawi, Paulus mengatakan belanja Covid-19 menjadi salah satu prioritas oleh Pemkab Melawi. Belanja Covid-19 juga menjadi salah satu item dalam perubahan kelima Perbup APBD 2020 yang akan dima-



sukkan, selain belanja rutin seperti belanja pegawai dan pembayaran tagihan listrik, air dan telepon.

“Untuk perubahan ke- lima (P5) masih berproses, semoga dalam waktu dekat ini bisa selesai,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemkab memang diketahui mem- buaf kebijakan untuk meng- hentikan sementara belanja

APBD, khususnya yang ber- sumber dari DAU sejak awal November lalu. Pemkab, ujar Paulus, masih menghitung

potensi terjadinya neraca defisit pada APBD 2020 ini serta pengalokasian angga- ran dalam P5. (eko/bah)